



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 76 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian pendapatan serta memenuhi keperluan belanja yang mendesak dan prioritas daerah, adanya beberapa perubahan yang perlu disesuaikan terhadap Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESK
		

Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
7		

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

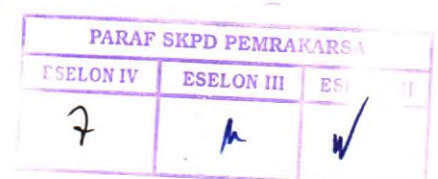
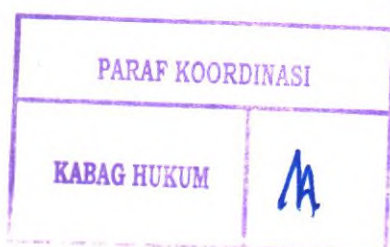
PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
7		

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
29. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
35. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyeteran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);



- 42. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala 2023 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 20);
- 43. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 00 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 00);
- 44. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Badan-Badan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Badan-Badan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 47);
- 45. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 1);
- 46. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 7);
- 47. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 13);
- 48. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 48 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 48);
- 49. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 76)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 76 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
7		

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 76), diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.632.562.671.461,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh dua miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- 2. Ketentuan ayat pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.765.062.671.461,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh lima miliar enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

- 3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.251.464.165.110,00 (satu triliun dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp784.382.274.542,00 (tujuh ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEN		KASA
ESELON IV	ESELON	ESELON II
7		

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp421.703.319.263,00 (empat ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp41.281.949.305,00 (empat puluh satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah);
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.096.622.000,00 (empat miliar sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp784.382.274.542,00 (tujuh ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. Belanja pegawai BOSP;
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp426.837.584.362,00 (empat ratus dua puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp324.687.493.607,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.882.480.552,00 (sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);

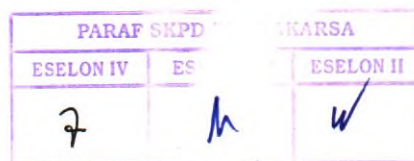
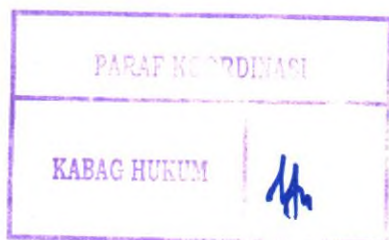
PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD		KASIA
ESELON IV	ESELON II	ESELON II
7	h	✓

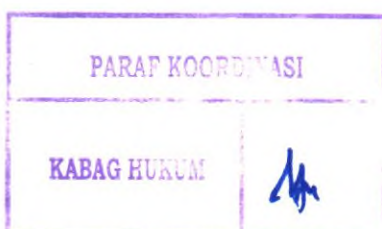
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.206.029.105,00 (satu miliar dua ratus enam juta dua puluh sembilan ribu seratus lima rupiah);
 - (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp601.600.000,00 (enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - (7) Belanja pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.167.086.916,00 (sebelas miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7) ayatn(8) dan ayat (9) pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp426.837.584.362,00 (empat ratus dua puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Tunjangan keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan fungsional ASN;
 - e. Tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Tunjangan beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan gaji ASN;
 - i. Iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Iuran jaminan kematian ASN;
 - l. Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN;
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp301.835.954.200,00 (tiga ratus satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.601.030.793,00 (dua puluh enam miliar enam ratus satu juta tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.071.792.676,00 (lima miliar tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);



- (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.662.353.737,00 (dua puluh empat miliar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - (6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.427.097.446,00 (dua miliar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);
 - (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.071.602.237,00 (enam belas miliar tujuh puluh satu juta enam ratus dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - (8) Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.694.097.380,00 (empat belas miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
 - (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 7.654.090,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh rupiah);
 - (10) Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp30.721.256.662,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);
 - (11) Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp757.914.760,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
 - (12) Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.273.833.016,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam belas rupiah);
 - (13) Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.712.997.365,00 (satu miliar tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
6. Merubah Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2024 menjadi Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana terlampir pada Peraturan Bupati ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.



7. Ketentuan Pasal 23 dirubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 23

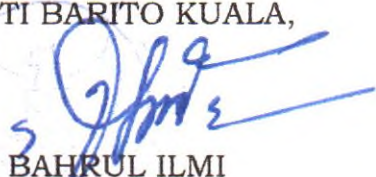
Pelaksanaan Penjabaran APBD dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Marabahan,
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI BARITO KUALA,



H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 17 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA



H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 9



KABUPATEN BARITO KUALA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,

OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	136.800.616.893,00	136.800.616.893,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	65.028.850.000,00	65.028.850.000,00	0,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.550.000.000,00	2.550.000.000,00	0,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	17.026.506.500,00	17.026.506.500,00	0,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	17.026.506.500,00	17.026.506.500,00	0,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	17.026.506.500,00	17.026.506.500,00	0,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	16.663.969.000,00	16.663.969.000,00	0,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	16.663.969.000,00	16.663.969.000,00	0,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	16.663.969.000,00	16.663.969.000,00	0,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	18.788.374.500,00	18.788.374.500,00	0,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	18.788.374.500,00	18.788.374.500,00	0,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	18.788.374.500,00	18.788.374.500,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.105.471.000,00	3.105.471.000,00	0,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	502.000.000,00	502.000.000,00	0,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.694.471.000,00	1.694.471.000,00	0,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	926.750.000,00	926.750.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	270.350.000,00	270.350.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	61.400.000,00	61.400.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	177.768.000,00	177.768.000,00	0,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	177.768.000,00	177.768.000,00	0,00
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air	131.928.000,00	131.928.000,00	0,00
4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	131.928.000,00	131.928.000,00	0,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	387.975.000,00	387.975.000,00	0,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	281.575.000,00	281.575.000,00	0,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	71.400.000,00	71.400.000,00	0,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	61.750.000,00	61.750.000,00	0,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	61.750.000,00	61.750.000,00	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	909.000.000,00	909.000.000,00	0,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	500.000,00	500.000,00	0,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	500.000,00	500.000,00	0,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.892.720.398,00	11.892.720.398,00	0,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	11.892.720.398,00	11.892.720.398,00	0,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.892.720.398,00	11.892.720.398,00	0,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.892.720.398,00	11.892.720.398,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	56.773.575.495,00	56.773.575.495,00	0,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.04.01.02.0122	Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.01.02.0136	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.693.780.365,00	2.693.780.365,00	0,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.693.780.365,00	2.693.780.365,00	0,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.693.780.365,00	2.693.780.365,00	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	46.129.795.130,00	46.129.795.130,00	0,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	46.129.795.130,00	46.129.795.130,00	0,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	46.129.795.130,00	46.129.795.130,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.549.892.100.000,00	1.495.762.054.568,00	-54.130.045.432,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.454.147.100.000,00	1.400.017.054.568,00	-54.130.045.432,00
4.2.01.05	Dana Desa	152.825.558.000,00	152.825.558.000,00	0,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	152.825.558.000,00	152.825.558.000,00	0,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	152.825.558.000,00	152.825.558.000,00	0,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.375.996.000,00	7.375.996.000,00	0,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.375.996.000,00	7.375.996.000,00	0,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.375.996.000,00	7.375.996.000,00	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	372.909.365.000,00	372.909.365.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.07.01	DBH Pajak	26.807.584.000,00	26.807.584.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	17.011.809.000,00	17.011.809.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	9.795.775.000,00	9.795.775.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	343.008.792.000,00	343.008.792.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	18.180.000,00	18.180.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	341.713.387.000,00	341.713.387.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	376.815.000,00	376.815.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	900.410.000,00	900.410.000,00	0,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	3.092.989.000,00	3.092.989.000,00	0,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	3.092.989.000,00	3.092.989.000,00	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	629.635.066.000,00	614.752.501.568,00	-14.882.564.432,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	629.635.066.000,00	508.661.644.000,00	-120.973.422.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	629.635.066.000,00	508.661.644.000,00	-120.973.422.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	0,00	106.090.857.568,00	106.090.857.568,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	15.750.873.000,00	15.750.873.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	35.585.553.000,00	35.585.553.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	40.522.087.000,00	40.522.087.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	13.032.344.568,00	13.032.344.568,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	291.401.115.000,00	252.153.634.000,00	-39.247.481.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	93.682.763.000,00	53.853.882.000,00	-39.828.881.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	2.082.211.000,00	2.082.211.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	33.794.637.000,00	33.794.637.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.01.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	34.800.748.000,00	0,00	-34.800.748.000,00
4.2.01.09.01.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	10.469.281.000,00	10.469.281.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	7.507.753.000,00	7.507.753.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.028.133.000,00	0,00	-5.028.133.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	197.718.352.000,00	198.299.752.000,00	581.400.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	37.845.608.000,00	37.845.608.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.437.500.000,00	1.437.500.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	113.785.266.000,00	113.785.266.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.142.500.000,00	1.142.500.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.852.859.000,00	1.852.859.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.883.430.000,00	1.883.430.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	400.660.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	496.970.000,00	0,00	-496.970.000,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	6.343.362.000,00	6.343.362.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	9.389.272.000,00	9.389.272.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	409.155.000,00	409.155.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	15.991.270.000,00	15.991.270.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	6.635.500.000,00	6.635.500.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0041	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	0,00	496.970.000,00	496.970.000,00
4.2.01.09.02.0043	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian	0,00	581.400.000,00	581.400.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	95.745.000.000,00	95.745.000.000,00	0,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	95.745.000.000,00	95.745.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	95.745.000.000,00	95.745.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	69.800.000.000,00	69.800.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.686.692.716.893,00	1.632.562.671.461,00	-54.130.045.432,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.254.986.858.805,00	1.251.464.165.110,00	-3.522.693.695,00
5.1.01	Belanja Pegawai	784.428.867.080,00	784.382.274.542,00	-46.592.538,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	426.913.581.819,00	426.837.584.362,00	-75.997.457,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	301.898.634.341,00	301.835.954.200,00	-62.680.141,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	218.894.892.146,00	218.861.113.915,00	-33.778.231,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	83.003.742.195,00	82.974.840.285,00	-28.901.910,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	26.618.751.761,00	26.601.030.793,00	-17.720.968,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	18.980.452.950,00	18.966.466.946,00	-13.986.004,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	7.638.298.811,00	7.634.563.847,00	-3.734.964,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.071.792.676,00	5.071.792.676,00	0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.071.792.676,00	5.071.792.676,00	0,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	24.655.593.737,00	24.662.353.737,00	6.760.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	16.893.092.225,00	16.889.852.225,00	-3.240.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7.762.501.512,00	7.772.501.512,00	10.000.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.415.482.446,00	2.427.097.446,00	11.615.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.838.645.391,00	1.838.645.391,00	0,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	576.837.055,00	588.452.055,00	11.615.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	16.087.392.817,00	16.071.602.237,00	-15.790.580,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.718.772.333,00	10.707.544.213,00	-11.228.120,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.368.620.484,00	5.364.058.024,00	-4.562.460,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.691.955.771,00	14.694.097.380,00	2.141.609,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.633.559.124,00	14.633.559.124,00	0,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	58.396.647,00	60.538.256,00	2.141.609,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7.976.467,00	7.654.090,00	-322.377,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.089.074,00	3.766.697,00	-322.377,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.887.393,00	3.887.393,00	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	30.721.256.662,00	30.721.256.662,00	0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	21.575.067.741,00	21.575.067.741,00	0,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	9.146.188.921,00	9.146.188.921,00	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	757.914.760,00	757.914.760,00	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	545.832.754,00	545.832.754,00	0,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	212.082.006,00	212.082.006,00	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.273.833.016,00	2.273.833.016,00	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.637.497.773,00	1.637.497.773,00	0,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	636.335.243,00	636.335.243,00	0,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.712.997.365,00	1.712.997.365,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.230.475.704,00	1.230.475.704,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	482.521.661,00	482.521.661,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	324.658.088.688,00	324.687.493.607,00	29.404.919,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	57.520.654.332,00	57.424.305.578,00	-96.348.754,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	42.245.985.593,00	42.289.415.612,00	43.430.019,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	15.274.668.739,00	15.134.889.966,00	-139.778.773,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	26.190.529.126,00	26.599.533.902,00	409.004.776,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	23.976.964.199,00	24.154.894.019,00	177.929.820,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	2.213.564.927,00	2.444.639.883,00	231.074.956,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.410.432.362,00	2.470.432.362,00	60.000.000,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.410.432.362,00	2.470.432.362,00	60.000.000,00
5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	117.157.330.220,00	116.815.471.617,00	-341.858.603,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	89.295.971.005,00	89.214.720.540,00	-81.250.465,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	27.861.359.215,00	27.600.751.077,00	-260.608.138,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	121.379.142.648,00	121.377.750.148,00	-1.392.500,00
5.1.01.02.06.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	519.402.366,00	519.402.366,00	0,00
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	106.250.000,00	106.250.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	723.626.526,00	723.626.526,00	0,00
5.1.01.02.06.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	148.750.000,00	148.750.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	483.287.473,00	483.287.473,00	0,00
5.1.01.02.06.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	126.356.500,00	126.356.500,00	0,00
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	928.460,00	928.460,00	0,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	8.414.700,00	8.414.700,00	0,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	17.613.413,00	17.613.413,00	0,00
5.1.01.02.06.0036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal	227.500,00	227.500,00	0,00
5.1.01.02.06.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	46.750,00	46.750,00	0,00
5.1.01.02.06.0042	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	7.055.090,00	7.055.090,00	0,00
5.1.01.02.06.0044	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	6.931.040,00	6.931.040,00	0,00
5.1.01.02.06.0045	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	3.394.500,00	3.394.500,00	0,00
5.1.01.02.06.0047	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	21.250,00	21.250,00	0,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0051	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2.486.250,00	2.486.250,00	0,00
5.1.01.02.06.0062	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	113.785.266.000,00	113.785.266.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.852.859.000,00	1.852.859.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.142.500.000,00	1.142.500.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.336.894.316,00	1.336.894.316,00	0,00
5.1.01.02.06.0068	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	188.249.621,00	188.249.621,00	0,00
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	571.071.893,00	569.679.393,00	-1.392.500,00
5.1.01.02.06.0070	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0071	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0072	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	19.882.480.552,00	19.882.480.552,00	0,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	893.760.000,00	893.760.000,00	0,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	893.760.000,00	893.760.000,00	0,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	122.073.000,00	122.073.000,00	0,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	122.073.000,00	122.073.000,00	0,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	165.600.400,00	165.600.400,00	0,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	165.600.400,00	165.600.400,00	0,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	78.204.000,00	78.204.000,00	0,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	78.204.000,00	78.204.000,00	0,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.161.958.000,00	1.161.958.000,00	0,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.161.958.000,00	1.161.958.000,00	0,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	116.379.900,00	116.379.900,00	0,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	116.379.900,00	116.379.900,00	0,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	40.924.800,00	40.924.800,00	0,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	40.924.800,00	40.924.800,00	0,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.042.500.000,00	4.042.500.000,00	0,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.042.500.000,00	4.042.500.000,00	0,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00	1.102.500.000,00	0,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00	1.102.500.000,00	0,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	17.150.000,00	17.150.000,00	0,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	17.150.000,00	17.150.000,00	0,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1.233.127,00	1.233.127,00	0,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1.233.127,00	1.233.127,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.170.737.325,00	6.170.737.325,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	70.787.325,00	70.787.325,00	0,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.093.000.000,00	6.093.000.000,00	0,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.913.600.000,00	5.913.600.000,00	0,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.913.600.000,00	5.913.600.000,00	0,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	55.860.000,00	55.860.000,00	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	55.860.000,00	55.860.000,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.206.029.105,00	1.206.029.105,00	0,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	55.965.000,00	0,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	55.965.000,00	0,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.616.200,00	3.616.200,00	0,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.616.200,00	3.616.200,00	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	100.737.000,00	0,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	100.737.000,00	0,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.156.870,00	4.156.870,00	0,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.156.870,00	4.156.870,00	0,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.632.036,00	1.632.036,00	0,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.632.036,00	1.632.036,00	0,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.984,00	1.984,00	0,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.984,00	1.984,00	0,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.865.300,00	5.865.300,00	0,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.865.300,00	5.865.300,00	0,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	186.404,00	186.404,00	0,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	186.404,00	186.404,00	0,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	559.212,00	559.212,00	0,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	559.212,00	559.212,00	0,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	993.145.135,00	993.145.135,00	0,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	44.250.000,00	44.250.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	950.000,00	950.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	127.698.799,00	127.698.799,00	0,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	61.250.000,00	61.250.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	170.265.065,00	170.265.065,00	0,00
5.1.01.05.10.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	231.682.402,00	231.682.402,00	0,00
5.1.01.05.10.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	244.248.869,00	244.248.869,00	0,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	40.163.964,00	40.163.964,00	0,00
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	700.000,00	700.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	5.247.254,00	5.247.254,00	0,00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	270.000,00	270.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	6.855.250,00	6.855.250,00	0,00
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	42.000,00	42.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	11.000,00	11.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	1.777.680,00	1.777.680,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	4.415.250,00	4.415.250,00	0,00
5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000,00	5.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0032	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.023.750,00	1.023.750,00	0,00
5.1.01.05.11.0036	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0038	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	30.000,00	30.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0041	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	617.500,00	617.500,00	0,00
5.1.01.05.11.0042	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air	1.319.280,00	1.319.280,00	0,00
5.1.01.05.12	Belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.12.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan bagi KDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00	601.600.000,00	0,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	11.167.086.916,00	11.167.086.916,00	0,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	11.167.086.916,00	11.167.086.916,00	0,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	11.167.086.916,00	11.167.086.916,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.103.459.725,00	421.703.319.263,00	-3.400.140.462,00
5.1.02.01	Belanja Barang	81.161.959.044,00	81.576.598.264,00	414.639.220,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	77.654.111.544,00	76.958.250.764,00	-695.860.780,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	637.230.415,00	637.230.415,00	0,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.107.496.705,00	2.107.496.705,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.792.429.930,00	7.062.905.530,00	-729.524.400,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.118.735.500,00	1.118.735.500,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	200.000,00	200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	167.350.000,00	167.350.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.139.842.650,00	2.164.342.650,00	24.500.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	392.000.000,00	392.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.971.732.307,00	6.012.766.227,00	41.033.920,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.990.131.700,00	2.252.439.880,00	-737.691.820,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.165.005.925,00	1.158.905.925,00	-6.100.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	233.757.300,00	233.757.300,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.707.225.024,00	1.360.990.024,00	-346.235.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	147.879.580,00	147.879.580,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	424.895.768,00	424.895.768,00	0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	436.145.000,00	436.145.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	121.800.000,00	124.400.000,00	2.600.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.657.261.034,00	2.667.616.034,00	10.355.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.870.198.768,00	2.870.212.788,00	14.020,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6.448.436.142,00	6.448.436.142,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.846.502.570,00	10.946.602.570,00	1.100.100.000,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	912.642.000,00	912.642.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	405.377.000,00	405.377.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	240.107.000,00	240.107.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.007.792.226,00	14.050.719.726,00	42.927.500,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.415.830.000,00	1.415.830.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1.873.605.000,00	1.873.605.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.680.985.200,00	3.680.985.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.222.276.800,00	3.123.226.800,00	-99.050.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	102.700.000,00	102.700.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	135.380.000,00	135.380.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	297.400.000,00	297.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	632.200.000,00	652.810.000,00	20.610.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	615.050.000,00	591.150.000,00	-23.900.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	375.500.000,00	380.000.000,00	4.500.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.507.847.500,00	4.618.347.500,00	1.110.500.000,00
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	249.850.000,00	249.850.000,00
5.1.02.01.04.0121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	192.000.000,00	190.000.000,00
5.1.02.01.04.0125	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	196.747.500,00	196.747.500,00	0,00
5.1.02.01.04.0218	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0710	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	850.000.000,00	1.520.650.000,00	670.650.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	160.025.921.383,00	160.958.124.921,00	932.203.538,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	88.531.244.563,00	90.084.642.101,00	1.553.397.538,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.050.150.000,00	9.148.600.000,00	98.450.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.905.315.000,00	2.905.315.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	536.400.000,00	536.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	33.350.000,00	33.350.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	29.150.000,00	29.150.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	243.000.000,00	243.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	820.600.000,00	820.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.159.000.000,00	1.159.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.765.286.996,00	2.764.886.996,00	-400.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	375.482.000,00	366.482.000,00	-9.000.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	691.200.000,00	691.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	45.375.000,00	45.375.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	206.320.000,00	787.720.000,00	581.400.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	560.500.000,00	575.500.000,00	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	14.561.850.000,00	14.570.500.000,00	8.650.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	125.150.000,00	125.150.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.467.856.150,00	6.503.006.150,00	35.150.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.690.961.700,00	8.808.841.700,00	117.880.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.141.758.000,00	4.171.408.000,00	29.650.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	341.725.000,00	341.825.000,00	100.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	16.425.000,00	16.425.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	372.850.000,00	368.850.000,00	-4.000.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	15.150.000,00	16.075.000,00	925.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	347.000.000,00	347.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.394.100.000,00	1.394.100.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.733.500.000,00	3.738.500.000,00	5.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	27.220.000,00	27.220.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	405.460.000,00	405.460.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	163.285.000,00	761.285.000,00	598.000.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	19.875.000,00	19.875.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.810.377.300,00	1.810.377.300,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	29.700.000,00	30.300.000,00	600.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	948.951.100,00	956.951.100,00	8.000.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	7.010.600.000,00	7.001.000.000,00	-9.600.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	305.387.500,00	305.387.500,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.009.899.046,00	4.040.899.046,00	31.000.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	222.880.000,00	222.880.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	855.000.000,00	855.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	48.800.000,00	48.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	686.352.000,00	686.352.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	7.748.400.000,00	7.748.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	154.500.000,00	154.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.497.667.771,00	3.544.260.309,00	46.592.538,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	22.060.000,00	22.060.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	771.375.000,00	771.375.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	54.265.348.820,00	54.265.348.820,00	0,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.903.990.020,00	1.903.990.020,00	0,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	49.703.596.000,00	49.703.596.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	354.533.200,00	354.533.200,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	351.652.800,00	351.652.800,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	429.009.600,00	429.009.600,00	0,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	906.290.000,00	906.290.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	616.277.200,00	616.277.200,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.476.977.500,00	2.515.477.500,00	38.500.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	107.500.000,00	115.000.000,00	7.500.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	522.000.000,00	522.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	577.720.000,00	577.720.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	473.000.000,00	504.000.000,00	31.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	51.207.500,00	51.207.500,00	0,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0124	Belanja Sewa Alat Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	324.500.000,00	324.500.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	73.300.000,00	73.300.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	51.750.000,00	51.750.000,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.940.016.500,00	4.861.092.500,00	-78.924.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	186.900.000,00	186.900.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.193.789.000,00	4.117.605.000,00	-76.184.000,00
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	91.290.000,00	90.790.000,00	-500.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	109.787.500,00	107.547.500,00	-2.240.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	318.250.000,00	318.250.000,00	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	86.100.000,00	86.100.000,00	0,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	53.900.000,00	53.900.000,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.583.000.000,00	2.533.000.000,00	-50.000.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	573.000.000,00	573.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	300.000.000,00	400.000.000,00	100.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	475.000.000,00	325.000.000,00	-150.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	733.000.000,00	248.000.000,00	-485.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	733.000.000,00	248.000.000,00	-485.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.360.234.000,00	6.314.464.000,00	-45.770.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.444.530.000,00	4.378.530.000,00	-66.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.042.650.000,00	1.042.650.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	873.054.000,00	893.284.000,00	20.230.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	29.065.679.320,00	25.057.546.320,00	-4.008.133.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.416.484.120,00	6.416.484.120,00	0,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	1.185.000.000,00	1.185.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	84.780.000,00	84.780.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	196.000.150,00	196.000.150,00	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.324.250.000,00	1.324.250.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	669.375.000,00	669.375.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	215.800.000,00	215.800.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	89.080.000,00	89.080.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	651.509.970,00	651.509.970,00	0,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	135.500.000,00	135.500.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	235.300.000,00	235.300.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	489.100.000,00	489.100.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	315.330.000,00	315.330.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	495.909.000,00	495.909.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.742.775.900,00	4.712.775.900,00	-30.000.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.439.775.900,00	3.409.775.900,00	-30.000.000,00
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.902.819.300,00	13.924.686.300,00	-3.978.133.000,00
5.1.02.03.04.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	17.240.819.300,00	13.262.686.300,00	-3.978.133.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	662.000.000,00	662.000.000,00	0,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.1.02.03.05.0045	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	84.877.238.386,00	84.756.688.166,00	-120.550.220,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	84.877.238.386,00	84.756.688.166,00	-120.550.220,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63.743.419.050,00	63.634.120.550,00	-109.298.500,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.133.819.336,00	21.122.567.616,00	-11.251.720,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.457.106.100,00	4.838.806.100,00	-618.300.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.914.150.000,00	2.399.150.000,00	485.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.786.250.000,00	1.786.250.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	0,00	485.000.000,00	485.000.000,00
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	110.700.000,00	110.700.000,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.542.956.100,00	2.439.656.100,00	-1.103.300.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	3.542.956.100,00	2.439.656.100,00	-1.103.300.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	34.030.919.160,00	34.030.919.160,00	0,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	32.965.310.840,00	32.965.310.840,00	0,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	31.527.810.840,00	31.527.810.840,00	0,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	1.437.500.000,00	1.437.500.000,00	0,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	731.913.000,00	731.913.000,00	0,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	716.913.000,00	716.913.000,00	0,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	333.695.320,00	333.695.320,00	0,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	243.695.320,00	243.695.320,00	0,00
5.1.02.89.03.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	30.484.636.332,00	30.484.636.332,00	0,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	30.484.636.332,00	30.484.636.332,00	0,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	30.484.636.332,00	30.484.636.332,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	41.357.910.000,00	41.281.949.305,00	-75.960.695,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	31.952.500.000,00	31.876.539.305,00	-75.960.695,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	22.052.500.000,00	21.976.539.305,00	-75.960.695,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.055.000.000,00	4.055.000.000,00	0,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	17.997.500.000,00	17.921.539.305,00	-75.960.695,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.050.000.000,00	7.050.000.000,00	0,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.050.000.000,00	7.050.000.000,00	0,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.377.528.000,00	1.377.528.000,00	0,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.377.528.000,00	1.377.528.000,00	0,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.377.528.000,00	1.377.528.000,00	0,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	8.027.882.000,00	8.027.882.000,00	0,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	923.980.000,00	923.980.000,00	0,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	923.980.000,00	923.980.000,00	0,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	5.566.152.000,00	5.566.152.000,00	0,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	5.566.152.000,00	5.566.152.000,00	0,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.537.750.000,00	1.537.750.000,00	0,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.537.750.000,00	1.537.750.000,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.096.622.000,00	4.096.622.000,00	0,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.944.707.000,00	2.944.707.000,00	0,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.916.982.000,00	2.916.982.000,00	0,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.916.982.000,00	2.916.982.000,00	0,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	27.725.000,00	27.725.000,00	0,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	27.725.000,00	27.725.000,00	0,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	951.915.000,00	951.915.000,00	0,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	951.915.000,00	951.915.000,00	0,00
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	951.915.000,00	951.915.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	294.611.345.751,00	246.003.994.014,00	-48.607.351.737,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.907.548.340,00	2.907.548.340,00	0,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2.907.548.340,00	2.907.548.340,00	0,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	2.907.548.340,00	2.907.548.340,00	0,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	151.000.000,00	151.000.000,00	0,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	2.756.548.340,00	2.756.548.340,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.636.683.235,00	33.636.683.235,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.943.044.780,00	2.943.044.780,00	0,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.335.000.000,00	1.335.000.000,00	0,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	1.335.000.000,00	1.335.000.000,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.608.044.780,00	1.608.044.780,00	0,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	1.608.044.780,00	1.608.044.780,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.583.227.922,00	5.583.227.922,00	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.513.227.922,00	5.513.227.922,00	0,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.178.913.000,00	2.178.913.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	528.127.000,00	528.127.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.106.187.922,00	2.106.187.922,00	0,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	365.763.000,00	365.763.000,00	0,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	37.763.000,00	37.763.000,00	0,00
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	33.763.000,00	33.763.000,00	0,00
5.2.02.03.01.0008	Belanja Modal Peralatan Las	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	328.000.000,00	328.000.000,00	0,00
5.2.02.03.03.0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	143.000.000,00	143.000.000,00	0,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	0,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.377.627.180,00	5.377.627.180,00	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	445.998.840,00	445.998.840,00	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	32.178.990,00	32.178.990,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	413.819.850,00	413.819.850,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.365.566.290,00	4.365.566.290,00	0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	492.229.150,00	492.229.150,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.280.620.100,00	1.280.620.100,00	0,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.429.717.040,00	2.429.717.040,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	566.062.050,00	566.062.050,00	0,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	40.362.850,00	40.362.850,00	0,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	43.312.500,00	43.312.500,00	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	292.186.700,00	292.186.700,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	758.660.115,00	758.660.115,00	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	758.660.115,00	758.660.115,00	0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	335.500.000,00	335.500.000,00	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	418.660.115,00	418.660.115,00	0,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.468.811.000,00	1.468.811.000,00	0,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.468.811.000,00	1.468.811.000,00	0,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.468.811.000,00	1.468.811.000,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.272.432.000,00	2.272.432.000,00	0,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	2.272.432.000,00	2.272.432.000,00	0,00
5.2.02.08.03.0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	236.224.000,00	236.224.000,00	0,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	2.036.208.000,00	2.036.208.000,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.487.675.515,00	3.487.675.515,00	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.757.468.375,00	2.757.468.375,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.178.468.375,00	2.178.468.375,00	0,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	579.000.000,00	579.000.000,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	730.207.140,00	730.207.140,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	490.707.140,00	490.707.140,00	0,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	239.500.000,00	239.500.000,00	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	92.400.000,00	92.400.000,00	0,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	5.516.269.840,00	5.516.269.840,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	5.443.748.160,00	5.443.748.160,00	0,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	5.443.748.160,00	5.443.748.160,00	0,00
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	60.297.000,00	60.297.000,00	0,00
5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	60.297.000,00	60.297.000,00	0,00
5.2.02.89.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	12.224.680,00	12.224.680,00	0,00
5.2.02.89.03.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	12.224.680,00	12.224.680,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.183.071.883,00	4.183.071.883,00	0,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.183.071.883,00	4.183.071.883,00	0,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.183.071.883,00	4.183.071.883,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	109.442.359.320,00	94.635.755.583,00	-14.806.603.737,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	109.327.359.320,00	94.520.755.583,00	-14.806.603.737,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	107.211.359.320,00	92.404.755.583,00	-14.806.603.737,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	82.935.153.320,00	68.128.549.583,00	-14.806.603.737,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	9.556.800.000,00	9.556.800.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	10.584.906.000,00	10.584.906.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	2.975.000.000,00	2.975.000.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.116.000.000,00	2.116.000.000,00	0,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
5.2.03.01.02.0006	Belanja Modal Hotel	1.266.000.000,00	1.266.000.000,00	0,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	144.945.475.856,00	111.144.727.856,00	-33.800.748.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	124.509.059.875,00	90.708.311.875,00	-33.800.748.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	106.390.739.875,00	79.208.311.875,00	-27.182.428.000,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	57.587.386.000,00	30.404.958.000,00	-27.182.428.000,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	245.800.000,00	245.800.000,00	0,00

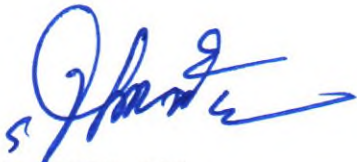
KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	13.792.305.000,00	13.792.305.000,00	0,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	34.765.248.875,00	34.765.248.875,00	0,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	18.118.320.000,00	11.500.000.000,00	-6.618.320.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	13.018.320.000,00	5.400.000.000,00	-7.618.320.000,00
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	5.100.000.000,00	6.100.000.000,00	1.000.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	4.050.000.000,00	4.050.000.000,00	0,00
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	4.050.000.000,00	4.050.000.000,00	0,00
5.2.04.02.02.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut	3.350.000.000,00	3.350.000.000,00	0,00
5.2.04.02.02.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pasang Surut	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	515.415.981,00	515.415.981,00	0,00
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	515.415.981,00	515.415.981,00	0,00
5.2.04.03.06.0002	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
5.2.04.03.06.0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	445.415.981,00	445.415.981,00	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	15.871.000.000,00	15.871.000.000,00	0,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	14.225.000.000,00	14.225.000.000,00	0,00
5.2.04.04.01.0003	Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi	14.225.000.000,00	14.225.000.000,00	0,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.646.000.000,00	1.646.000.000,00	0,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.646.000.000,00	1.646.000.000,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	396.579.000,00	396.579.000,00	0,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	141.750.000,00	141.750.000,00	0,00
5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	141.750.000,00	141.750.000,00	0,00
5.2.05.03.02.0004	Belanja Modal Ternak Lainnya	141.750.000,00	141.750.000,00	0,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	39.829.000,00	39.829.000,00	0,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	39.829.000,00	39.829.000,00	0,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	39.829.000,00	39.829.000,00	0,00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.282.700.000,00	3.282.700.000,00	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	3.282.700.000,00	3.282.700.000,00	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	3.282.700.000,00	3.282.700.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	100.700.000,00	100.700.000,00	0,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	3.182.000.000,00	3.182.000.000,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-2.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-2.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-2.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-2.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-2.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	259.594.512.337,00	259.594.512.337,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.823.810.137,00	6.823.810.137,00	0,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	323.810.137,00	323.810.137,00	0,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	323.810.137,00	323.810.137,00	0,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	323.810.137,00	323.810.137,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	252.770.702.200,00	252.770.702.200,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	252.770.702.200,00	252.770.702.200,00	0,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	252.770.702.200,00	252.770.702.200,00	0,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	252.770.702.200,00	252.770.702.200,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.819.192.716.893,00	1.765.062.671.461,00	-54.130.045.432,00
	Total Surplus/(Defisit)	-132.500.000.000,00	-132.500.000.000,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	140.500.000.000,00	140.500.000.000,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	132.500.000.000,00	132.500.000.000,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	132.500.000.000,00	132.500.000.000,00	0,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	132.500.000.000,00	132.500.000.000,00	0,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	132.500.000.000,00	132.500.000.000,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
6.1.05.06.01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.05.06.01.0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	140.500.000.000,00	140.500.000.000,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
6.2.04.06	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
6.2.04.06.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
6.2.04.06.01.0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	132.500.000.000,00	132.500.000.000,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Barito Kuala, 17 Maret 2025

Bupati

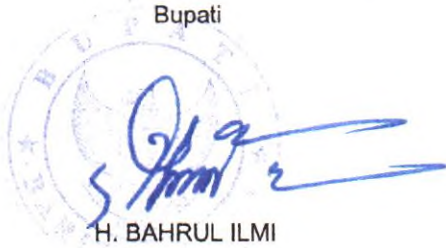


H. BAHRUL ILMI

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.05.06.01.0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	140.500.000.000,00	140.500.000.000,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
6.2.04.06	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
6.2.04.06.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
6.2.04.06.01.0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	132.500.000.000,00	132.500.000.000,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Barito Kuala, 17 Maret 2025

Bupati



H. BAHRUL ILMI



KABUPATEN BARITO KUALA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	1.686.692.716.893,00	1.632.562.671.461,00	-54.130.045.432,00	
4	PENDAPATAN TRANSFER	1.549.892.100.000,00	1.495.762.054.568,00	-54.130.045.432,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.454.147.100.000,00	1.400.017.054.568,00	-54.130.045.432,00	
4.2.01.05	Dana Desa	152.825.558.000,00	152.825.558.000,00	0,00	
4.2.01.05.01	Dana Desa	152.825.558.000,00	152.825.558.000,00	0,00	
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	152.825.558.000,00	152.825.558.000,00	0,00	
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.375.996.000,00	7.375.996.000,00	0,00	
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.375.996.000,00	7.375.996.000,00	0,00	
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.375.996.000,00	7.375.996.000,00	0,00	
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	372.909.365.000,00	372.909.365.000,00	0,00	
4.2.01.07.01	DBH Pajak	26.807.584.000,00	26.807.584.000,00	0,00	
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	17.011.809.000,00	17.011.809.000,00	0,00	
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	9.795.775.000,00	9.795.775.000,00	0,00	
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	343.008.792.000,00	343.008.792.000,00	0,00	
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	18.180.000,00	18.180.000,00	0,00	
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	341.713.387.000,00	341.713.387.000,00	0,00	
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	376.815.000,00	376.815.000,00	0,00	
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	900.410.000,00	900.410.000,00	0,00	
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	3.092.989.000,00	3.092.989.000,00	0,00	
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	3.092.989.000,00	3.092.989.000,00	0,00	
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	629.635.066.000,00	614.752.501.568,00	-14.882.564.432,00	
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	629.635.066.000,00	508.661.644.000,00	-120.973.422.000,00	
4.2.01.08.01.0001	DAU	629.635.066.000,00	508.661.644.000,00	-120.973.422.000,00	
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	0,00	106.090.857.568,00	106.090.857.568,00	
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	15.750.873.000,00	15.750.873.000,00	
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	35.585.553.000,00	35.585.553.000,00	
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	40.522.087.000,00	40.522.087.000,00	
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	13.032.344.568,00	13.032.344.568,00	
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	291.401.115.000,00	252.153.634.000,00	-39.247.481.000,00	
4.2.01.09.01	DAK Fisik	93.682.763.000,00	53.853.882.000,00	-39.828.881.000,00	
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	2.082.211.000,00	2.082.211.000,00	0,00	
4.2.01.09.01.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	33.794.637.000,00	33.794.637.000,00	0,00	
4.2.01.09.01.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penggunaan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	
4.2.01.09.01.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	34.800.748.000,00	0,00	-34.800.748.000,00	
4.2.01.09.01.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	10.469.281.000,00	10.469.281.000,00	0,00	
4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	7.507.753.000,00	7.507.753.000,00	0,00	
4.2.01.09.01.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penggunaan	5.028.133.000,00	0,00	-5.028.133.000,00	
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	197.718.352.000,00	198.299.752.000,00	581.400.000,00	
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	37.845.608.000,00	37.845.608.000,00	0,00	
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.437.500.000,00	1.437.500.000,00	0,00	
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	113.785.266.000,00	113.785.266.000,00	0,00	

4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.142.500.000,00	1.142.500.000,00	0,00	
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.852.859.000,00	1.852.859.000,00	0,00	
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjataan	1.883.430.000,00	1.883.430.000,00	0,00	
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	400.660.000,00	0,00	
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	496.970.000,00	0,00	-496.970.000,00	
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	6.343.362.000,00	6.343.362.000,00	0,00	
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjataan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	9.389.272.000,00	9.389.272.000,00	0,00	
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	409.155.000,00	409.155.000,00	0,00	
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	15.991.270.000,00	15.991.270.000,00	0,00	
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	6.635.500.000,00	6.635.500.000,00	0,00	
4.2.01.09.02.0041	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	0,00	496.970.000,00	496.970.000,00	
4.2.01.09.02.0043	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian	0,00	581.400.000,00	581.400.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	95.745.000.000,00	95.745.000.000,00	0,00	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	95.745.000.000,00	95.745.000.000,00	0,00	
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	95.745.000.000,00	95.745.000.000,00	0,00	
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00	0,00	
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00	0,00	
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	69.800.000.000,00	69.800.000.000,00	0,00	
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	0,00	
BELANJA DAERAH					
Urusan Pemerintahan	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
Organisasi	1.01.000.000.01.0000 DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA				
Unit Organisasi	1.01.000.000.01.0000 DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA				
Program	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Indikator Hasil	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD				
Kegiatan	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Indikator Keluaran	Persentase realisasi: administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan				
Sub Kegiatan	1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
Indikator Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	177.667.125,00	177.913.945,00	246.820,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.238.391.440,00	500.119.620,00	-738.271.820,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	646.250.000,00	300.015.000,00	-346.235.000,00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	214.924.000,00	164.924.000,00	-50.000.000,00	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	23.760.000,00	23.760.000,00	
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi				
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	249.850.000,00	249.850.000,00	

5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00	
5.1.02.01.04.0710	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	850.000.000,00	1.520.650.000,00	670.650.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.016.000,00	40.016.000,00	0,00	
5	BELANJA MODAL				
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga				
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga				
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	
Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
Indikator Hasil : Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B					
Kegiatan : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
Indikator Keluaran : Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang memiliki mebel sesuai standar					
Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					
Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	
Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.800.000,00	46.623.500,00	-176.500,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	176.500,00	176.500,00	
Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar					
Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN				
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	485.000.000,00	0,00	-485.000.000,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				

5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	0,00	485.000.000,00	485.000.000,00	
Bidang Urusan	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
Organisasi	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA				
Unit Organisasi	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA				
Program	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Indikator Hasil	: meningkatnya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan				
Kegiatan	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.01	Belanja Pegawai				
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN				
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	46.443.184.882,00	46.443.184.882,00	0,00	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	8.723.240.600,00	8.723.240.600,00	0,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN				
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	3.284.661.371,00	3.284.661.371,00	0,00	
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	714.828.184,00	714.828.184,00	0,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN				
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	337.470.000,00	337.470.000,00	0,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN				
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.818.165.000,00	4.818.165.000,00	0,00	
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	710.575.000,00	710.575.000,00	0,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN				
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	251.160.000,00	251.160.000,00	0,00	
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	39.150.000,00	39.150.000,00	0,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN				
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	2.168.037.540,00	2.168.037.540,00	0,00	
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	548.509.080,00	548.509.080,00	0,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN				
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.763.766.844,00	3.763.766.844,00	0,00	
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	8.025.673,00	8.025.673,00	0,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN				
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	655.001,00	655.001,00	0,00	
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	216.867,00	216.867,00	0,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN				
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.977.852.346,00	3.977.852.346,00	0,00	
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	686.454.709,00	686.454.709,00	0,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN				
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	111.461.250,00	111.461.250,00	0,00	
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	20.935.786,00	20.935.786,00	0,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN				
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	334.383.737,00	334.383.737,00	0,00	
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	62.807.338,00	62.807.338,00	0,00	
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN				
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	248.634.235,00	248.634.235,00	0,00	
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	47.190.346,00	47.190.346,00	0,00	

5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN				
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.207.430.108,00	2.307.430.108,00	1.100.000.000,00	
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	71.050.650,00	106.050.650,00	35.000.000,00	
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN				
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	14.669.075.180,00	13.569.075.180,00	-1.100.000.000,00	
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	2.113.152.878,00	2.053.152.878,00	-60.000.000,00	
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN				
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.264.209.290,00	2.264.209.290,00	0,00	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN				
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	20.861.860.803,00	20.861.860.803,00	0,00	
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	3.782.283.840,00	3.782.283.840,00	0,00	
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				
5.1.01.02.06.0068	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	134.640.000,00	134.640.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	287.512.500,00	312.512.500,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
Indikator Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	209.958.018,00	209.958.018,00	0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.175.000,00	31.375.000,00	18.200.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.200.000,00	15.300.000,00	8.100.000,00	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	32.300.000,00	0,00	-32.300.000,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	120.238.500,00	120.238.500,00	0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.237.280,00	60.237.280,00	0,00	
Program	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
Indikator Hasil	Nilai UHC (Universal Health Coverage)				
Kegiatan	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Indikator Keluaran	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Sub Kegiatan	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				
Indikator Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				

5	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.015.250,00	3.015.250,00	0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.998.750,00	1.998.750,00	0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.480.000,00	50.480.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	493.500.000,00	493.500.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	789.600.000,00	785.750.000,00	-3.850.000,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	26.400.000,00	30.250.000,00	3.850.000,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi				
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.223.200,00	3.223.200,00	0,00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.029.000,00	4.029.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.774.500,00	19.774.500,00	0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	79.143.770,00	79.143.770,00	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah				
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan				
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
Organisasi	: 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA				
Unit Organisasi	: 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA				
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi SAKIP SKPD				
Kegiatan	: 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi Administrasi keuangan				
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.01	Belanja Pegawai				
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN				
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.516.766.478,00	2.516.766.478,00	0,00	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	819.715.400,00	819.715.400,00	0,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN				
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	213.256.680,00	213.256.680,00	0,00	
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	95.025.980,00	95.025.980,00	0,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN				
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	108.430.000,00	108.430.000,00	0,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN				
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	37.072.000,00	37.072.000,00	0,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN				

5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	91.220.000,00	91.220.000,00	0,00	
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	39.195.000,00	39.195.000,00	0,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN				
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	123.983.040,00	123.983.040,00	0,00	
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	72.709.680,00	72.709.680,00	0,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN				
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	222.851.064,00	222.851.064,00	0,00	
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.110.813,00	2.110.813,00	0,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN				
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	28.237,00	28.237,00	0,00	
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	22.163,00	22.163,00	0,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN				
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	229.235.110,00	229.235.110,00	0,00	
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	76.953.212,00	76.953.212,00	0,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN				
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.040.246,00	6.040.246,00	0,00	
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.967.324,00	1.967.324,00	0,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN				
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.120.726,00	18.120.726,00	0,00	
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	5.901.953,00	5.901.953,00	0,00	
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN				
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	13.650.121,00	13.650.121,00	0,00	
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	4.573.716,00	4.573.716,00	0,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN				
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	771.385.453,00	766.385.453,00	-5.000.000,00	
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	287.325.413,00	287.325.413,00	0,00	
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN				
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	204.816.091,00	204.816.091,00	0,00	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN				
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.395.377.340,00	1.400.377.340,00	5.000.000,00	
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	497.070.225,00	497.070.225,00	0,00	
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	23.850.514,00	23.850.514,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	
Program	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
Indikator Hasil	1. Persentase Daerah Irigasi Rawa kewenangan kabupaten dalam kondisi baik				
Kegiatan	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Indikator Keluaran	1. Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				
Sub Kegiatan	1.03.02.2.01.0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota				
Indikator Keluaran	1. Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi				
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.661.500,00	33.661.500,00	0,00	
5	BELANJA MODAL				
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	13.350.000.000,00	13.350.000.000,00	0,00	
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan				
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	5.100.000.000,00	6.100.000.000,00	1.000.000.000,00	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air				
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut				
5.2.04.02.02.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pasang Surut	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
Kegiatan : 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
Indikator Keluaran : Luasan Daerah Irigasi Rawa kewenangan kabupaten dalam kondisi baik					
Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0016 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa					
Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi				
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	400.000.000,00	150.000.000,00	-250.000.000,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
5.1.02.03.04.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	8.892.319.300,00	4.914.186.300,00	-3.978.133.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	74.794.100,00	74.794.100,00	0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.612.875,00	34.612.875,00	0,00	
Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
Indikator Hasil : Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar					
Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laks Fungsi Bangunan Gedung					
Indikator Keluaran : Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar					
Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				

5	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	151.385.000,00	151.385.000,00	0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.291.750,00	39.291.750,00	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah				
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.320.000.000,00	6.244.039.305,00	-75.960.695,00	
5	BELANJA MODAL				
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung				
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja				
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	39.541.000.000,00	24.734.396.263,00	-14.806.603.737,00	
Program	: 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
Indikator Hasil	: Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap				
Kegiatan	: 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				
Indikator Keluaran	: Persentase Jumlah Ruas Jalan Kondisi Mantap				
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan				
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Diganti				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA MODAL				
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan				
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	7.618.320.000,00	0,00	-7.618.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan				
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direkonstruksi				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA MODAL				
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	27.182.428.000,00	0,00	-27.182.428.000,00	
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
Organisasi	: 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA				
Unit Organisasi	: 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA				
Program	: 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
Indikator Hasil	: Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani				
Kegiatan	: 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Layak Huni pada Kurun Waktu Tertentu				
Sub Kegiatan	: 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.000.000.000,00	2.100.000.000,00	1.100.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.155.475,00	16.155.475,00	0,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.300.000.000,00	200.000.000,00	-1.100.000.000,00	
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA				
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA				
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Indikator Hasil	: Jumlah Laporan Keuangan Sesuai SAP yang tepat waktu Nilai Evaluasi SAKIP SKPD Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan Persentase Penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Indikator Keluaran	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase realisasi Administrasi keuangan				
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.01	Belanja Pegawai				
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN				
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.001.336.081,00	989.461.081,00	-11.875.000,00	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	215.176.119,00	215.176.119,00	0,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN				
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	133.107.163,00	133.107.163,00	0,00	
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	24.742.606,00	24.742.606,00	0,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN				
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	68.670.000,00	68.670.000,00	0,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN				
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	14.840.000,00	14.840.000,00	0,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN				
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	32.005.000,00	32.005.000,00	0,00	
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	8.190.000,00	8.190.000,00	0,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN				
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	71.188.860,00	71.188.860,00	0,00	
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	19.118.880,00	19.118.880,00	0,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN				
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	112.642.747,00	112.642.747,00	0,00	
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	751.000,00	751.000,00	0,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN				
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.605,00	11.605,00	0,00	

5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.240,00	5.240,00	0,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN				
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	109.738.355,00	109.738.355,00	0,00	
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	20.463.281,00	20.463.281,00	0,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN				
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.403.214,00	2.403.214,00	0,00	
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	516.429,00	516.429,00	0,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN				
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.209.626,00	7.209.626,00	0,00	
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.549.272,00	1.549.272,00	0,00	
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN				
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	5.672.221,00	5.672.221,00	0,00	
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1.199.599,00	1.199.599,00	0,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN				
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	414.844.670,00	414.844.670,00	0,00	
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	77.474.325,00	77.474.325,00	0,00	
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN				
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	139.327.228,00	142.397.228,00	3.070.000,00	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN				
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	759.464.728,00	759.464.728,00	0,00	
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	132.957.630,00	132.957.630,00	0,00	
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				
5.1.01.02.06.0089	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.817.500,00	9.817.500,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.726.250,00	17.531.250,00	8.805.000,00	
Kegiatan	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Indikator Keluaran	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Persentase barang milik daerah yang terpelihara				
Sub Kegiatan	1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
Indikator Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	66.960.000,00	66.960.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	24.400.000,00	49.400.000,00	25.000.000,00	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	610.000.000,00	580.000.000,00	-30.000.000,00	

5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik Jaringan Listrik Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5	BELANJA MODAL				
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung				
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja				
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
Bidang Urusan	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
Organisasi	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA				
Unit Organisasi	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA				
Program	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Indikator Hasil	1. Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai Evaluasi SAKIP SKPD				
Kegiatan	1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Indikator Keluaran	Persentase Laporan Kinerja yang Disampaikan Tepat Waktu Persentase Realisasi Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemda				
Sub Kegiatan	1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Indikator Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	0,00	600.000,00	600.000,00	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	7.208.850,00	7.208.850,00	0,00	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	22.800.000,00	20.200.000,00	-2.600.000,00	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	
Urusan Pemerintahan	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
Organisasi	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA				
Unit Organisasi	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA				
Program	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
Indikator Hasil	1. Persentase Sampah Terkelola				
Kegiatan	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah				
Indikator Keluaran	Persentase pengurangan sampah				
Sub Kegiatan	2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				
Indikator Keluaran	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paka Habis				
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	210.480.000,00	210.480.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.056.483.000,00	1.326.303.000,00	-730.180.000,00	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	114.000.000,00	129.000.000,00	15.000.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.513.000,00	2.513.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	863.120.000,00	980.300.000,00	117.180.000,00	
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0,00	598.000.000,00	598.000.000,00	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	

5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59.869.000,00	59.869.000,00	0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.904.800,00	24.904.800,00	0,00	
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL				
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL KAB. BARITO KUALA				
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL KAB. BARITO KUALA				
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Indikator Hasil	: Jumlah Laporan Kinerja yang Disampaikan Tepat Waktu Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan				
Kegiatan	: 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu Persentase realisasi administrasi keuangan				
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.01	Belanja Pegawai				
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN				
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	855.474.681,00	855.474.681,00	0,00	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	484.456.800,00	484.456.800,00	0,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN				
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	82.835.851,00	82.835.851,00	0,00	
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	60.647.888,00	60.647.888,00	0,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN				
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	68.430.000,00	68.430.000,00	0,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN				
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	38.640.000,00	38.640.000,00	0,00	
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN				
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	17.515.000,00	17.515.000,00	0,00	
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	21.465.000,00	21.465.000,00	0,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN				
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	47.290.260,00	47.290.260,00	0,00	
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	42.003.600,00	42.003.600,00	0,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN				
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	126.525.928,00	126.525.928,00	0,00	
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.585.236,00	1.585.236,00	0,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN				
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.659,00	10.659,00	0,00	
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	12.083,00	12.083,00	0,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN				
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	89.957.138,00	89.957.138,00	0,00	
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	46.106.670,00	46.106.670,00	0,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN				
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.053.145,00	2.053.145,00	0,00	
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.162.701,00	1.162.701,00	0,00	

5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN				
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.159.425,00	6.159.425,00	0,00	
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	3.488.095,00	3.488.095,00	0,00	
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN				
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	4.691.557,00	4.691.557,00	0,00	
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	2.725.531,00	2.725.531,00	0,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN				
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	912.881.751,00	307.616.400,00	-605.265.351,00	
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	172.871.888,00	172.871.888,00	0,00	
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN				
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	118.445.288,00	148.084.200,00	29.638.912,00	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN				
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	0,00	569.808.901,00	569.808.901,00	
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	302.842.395,00	302.842.395,00	0,00	
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				
5.1.01.02.08.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	14.025.000,00	8.410.000,00	-5.615.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.098.712,00	17.531.250,00	11.432.538,00	
Kegiatan	2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Indikator Keluaran	Persentase realisasi pembayaran jasa penunjang urusan pemda				
Sub Kegiatan	2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Indikator Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	8.000.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	135.000.000,00	130.000.000,00	-5.000.000,00	
Bidang Urusan	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
Organisasi	2.13.1.02.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA				
Unit Organisasi	2.13.1.02.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA				
Program	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
Indikator Hasil	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang aktif				
Kegiatan	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				
Indikator Keluaran	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Dibina				
Sub Kegiatan	2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				
Indikator Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	14.500.000,00	6.000.000,00	-8.500.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.010.000,00	8.010.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa				

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juni Perombaan/Pertandingan	5.000.000,00	1.000.000,00	-4.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.640.000,00	6.640.000,00	0,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perombaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA				
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA				
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Indikator Hasil	: Persentase Realisasi Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Aset dan Perencanaan/Pelaporan				
Kegiatan	: 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Indikator Keluaran	: Persentase Realisasi Administrasi Keuangan				
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.01	Belanja Pegawai				
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN				
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	974.581.808,00	974.581.808,00	0,00	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	108.647.438,00	108.647.438,00	0,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN				
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	79.514.487,00	79.514.487,00	0,00	
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	15.210.641,00	15.210.641,00	0,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN				
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	104.826.750,00	104.826.750,00	0,00	
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN				
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	49.679.700,00	49.679.700,00	0,00	
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN				
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14.862.500,00	14.862.500,00	0,00	
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN				
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	48.992.130,00	48.992.130,00	0,00	
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.689.192,00	10.689.192,00	0,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN				
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	136.850.050,00	136.850.050,00	0,00	
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	159.672,00	159.672,00	0,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN				
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.723,00	14.723,00	0,00	
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.297,00	2.297,00	0,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN				
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	109.852.154,00	109.852.154,00	0,00	
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	9.924.504,00	9.924.504,00	0,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN				

5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.339.001,00	2.339.001,00	0,00	
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	260.757,00	260.757,00	0,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN				
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.016.998,00	7.016.998,00	0,00	
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	782.262,00	782.262,00	0,00	
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN				
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	619.297,00	619.297,00	0,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN				
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	396.789.023,00	396.789.023,00	0,00	
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	36.117.000,00	36.117.000,00	0,00	
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN				
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	193.113.030,00	193.113.030,00	0,00	
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	0,00	0,00	0,00	
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN				
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	0,00	0,00	0,00	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN				
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	698.612.521,00	678.612.521,00	-20.000.000,00	
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	63.840.600,00	63.840.600,00	0,00	
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.817.500,00	9.817.500,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	
Kegiatan : 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Indikator Keluaran : Persentase Realisasi Pembayaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	339.300.000,00	313.300.000,00	-26.000.000,00	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	20.000.000,00	46.000.000,00	26.000.000,00	
5	BELANJA MODAL				
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya				
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud				
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud				
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	700.000,00	700.000,00	0,00	
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
Organisasi : 3.27.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA					
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA					

Program	: 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan penyediaan daging ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)				
Kegiatan	: 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				
Indikator Keluaran	: Persentase penyelesaian kasus kejadian penyakit menular ternak				
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Indikator Keluaran	: Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	115.492.500,00	115.492.500,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	14.000.000,00	5.000.000,00	-9.000.000,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	96.750.000,00	105.750.000,00	9.000.000,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	49.275.000,00	49.275.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.685.000,00	40.685.000,00	0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.009.475,00	24.009.475,00	0,00	
5	BELANJA MODAL				
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer				
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit				
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.03.0000 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA				
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.3.31.03.0000 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA				
Program	: 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
Indikator Hasil	: Persentase keterisian gudang SRG				
Kegiatan	: 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				
Indikator Keluaran	: Jumlah komoditas (gabah) yang direst/gudangkan dalam sistem resi gudang (SRG)				
Sub Kegiatan	: 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				
Indikator Keluaran	: Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.552.000,00	6.552.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.820.000,00	8.820.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	12.440.000,00	12.440.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	24.480.000,00	24.480.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	193.500.000,00	193.500.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	

5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	193.500.000,00	193.500.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	64.090.250,00	64.090.250,00	0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.229.775,00	15.229.775,00	0,00	
5	BELANJA MODAL				
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga				
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor				
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	
Urusan Pemerintahan	4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	4.01 SEKRETARIAT DAERAH				
Organisasi	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH				
Unit Organisasi	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH				
Program	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Indikator Hasil	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan				
Kegiatan	4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Indikator Keluaran	Persentase penyusunan dokumen keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu				
Sub Kegiatan	4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Indikator Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.01	Belanja Pegawai				
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN				
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.933.290.799,00	3.933.290.799,00	0,00	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.160.165.999,00	1.160.165.999,00	0,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN				
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	386.713.536,00	386.713.536,00	0,00	
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	133.718.984,00	133.718.984,00	0,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN				
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	316.625.000,00	316.625.000,00	0,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN				
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	264.364.000,00	264.364.000,00	0,00	
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	90.720.000,00	90.720.000,00	0,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN				
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	87.050.000,00	87.050.000,00	0,00	
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	42.345.000,00	42.345.000,00	0,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN				
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	223.632.960,00	223.632.960,00	0,00	
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	100.229.280,00	100.229.280,00	0,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN				
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	764.191.799,00	764.191.799,00	0,00	
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	3.827.686,00	3.827.686,00	0,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN				
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	48.277,00	48.277,00	0,00	
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	30.105,00	30.105,00	0,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN				
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	487.004.763,00	487.004.763,00	0,00	
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	110.185.250,00	110.185.250,00	0,00	

5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN				
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9.439.903,00	9.439.903,00	0,00	
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.784.401,00	2.784.401,00	0,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN				
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	28.319.701,00	28.319.701,00	0,00	
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	8.353.196,00	8.353.196,00	0,00	
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN				
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	21.600.025,00	21.600.025,00	0,00	
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	6.469.433,00	6.469.433,00	0,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN				
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.639.790.920,00	1.639.790.920,00	0,00	
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	417.793.050,00	387.793.050,00	-30.000.000,00	
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN				
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	750.751.733,00	750.751.733,00	0,00	
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN				
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	146.090.010,00	206.090.010,00	60.000.000,00	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN				
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.109.044.403,00	3.109.044.403,00	0,00	
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	709.800.480,00	679.800.480,00	-30.000.000,00	
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	23.141.250,00	23.141.250,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	56.801.250,00	56.801.250,00	0,00	
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	771.375.000,00	771.375.000,00	0,00	
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD					
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO KUALA					
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO KUALA					
Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Indikator Hasil : Jumlah laporan keuangan sesuai SAP yang tepat waktu Nilai evaluasi SAKIP Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan					
Kegiatan : 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD					
Indikator Keluaran : Persentase kualitas pelayanan administrasi Set DPRD					
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.000.000,00	2.500.000,00	-7.500.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	452.720.000,00	453.380.000,00	660.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.200.000,00	15.600.000,00	5.400.000,00	

5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	400.000,00	400.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	25.000.000,00	51.400.000,00	26.400.000,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	45.000.000,00	60.000.000,00	15.000.000,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	2.500.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	162.425.000,00	99.965.000,00	-62.460.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	
Program	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
Indikator Hasil	: Indeks tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Set. DPRD				
Kegiatan	: 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD				
Indikator Keluaran	: Jumlah Anggota dewan yang mengikuti diklat				
Sub Kegiatan	4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD				
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.200.700,00	6.200.700,00	0,00	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	21.250.000,00	39.250.000,00	18.000.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	92.000.000,00	107.900.000,00	15.900.000,00	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.608.000,00	2.608.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.175.000,00	7.175.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.520.000,00	7.420.000,00	-2.100.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	618.000.000,00	618.000.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	175.806.000,00	144.006.000,00	-31.800.000,00	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN				
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA				
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA				
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Indikator Hasil	Nilai Evaluasi: SAKIP SKPD Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan Jumlah Laporan Keuangan Sesuai SAP yang tepat waktu				
Kegiatan	: 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu Persentase Realisasi Administrasi Keuangan Persentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN				
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.01	Belanja Pegawai				
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN				
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.234.884.031,00	1.218.980.800,00	-15.903.231,00	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	170.325.500,00	149.054.858,00	-21.270.642,00	

5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN				
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	109.551.498,00	103.355.584,00	-6.195.914,00	
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	9.674.964,00	5.940.000,00	-3.734.964,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN				
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	102.270.000,00	102.270.000,00	0,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN				
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	127.110.000,00	123.870.000,00	-3.240.000,00	
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	14.840.000,00	14.840.000,00	0,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN				
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	10.290.000,00	10.290.000,00	0,00	
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.950.000,00	3.330.000,00	-1.620.000,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN				
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	59.674.080,00	53.445.960,00	-6.228.120,00	
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	7.893.780,00	3.331.320,00	-4.562.460,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN				
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	178.863.286,00	178.863.286,00	0,00	
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.008.607,00	3.000.000,00	1.991.393,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN				
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	339.259,00	16.882,00	-322.377,00	
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.636,00	2.636,00	0,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN				
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	140.368.857,00	140.368.857,00	0,00	
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	18.093.943,00	18.093.943,00	0,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN				
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.963.727,00	2.963.727,00	0,00	
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	408.788,00	408.788,00	0,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN				
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.891.167,00	8.891.167,00	0,00	
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.226.350,00	1.226.350,00	0,00	
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN				
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	6.722.181,00	6.722.181,00	0,00	
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	900.006,00	900.006,00	0,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN				
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	528.276.360,00	511.721.200,00	-16.555.160,00	
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	82.314.525,00	50.027.600,00	-32.286.925,00	
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN				
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	210.223.530,00	219.346.400,00	9.122.870,00	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN				
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	979.904.340,00	1.132.082.400,00	152.178.060,00	
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	141.788.430,00	89.763.400,00	-52.025.030,00	
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.817.500,00	9.800.000,00	-17.500,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.02	Belanja Jasa				

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	16.830.000,00	17.500.000,00	670.000,00	
Program	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
Indikator Hasil	: Prosesntasi Jumlah Program APBD Terhadap Jumlah Program RPJMD Yang Harus Dilaksanakan				
Kegiatan	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				
Indikator Keluaran	: Prosesntasi Jumlah Program RKPD Terhadap Jumlah Program RPJMD Yang Harus Dilaksanakan				
Sub Kegiatan	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	71.275.000,00	53.303.220,00	-17.971.780,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.600.000,00	51.000.000,00	-1.600.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.797.000,00	41.797.000,00	0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.043.768,00	1.615.548,00	-11.428.220,00	
Bidang Urusan	5.02 KEUANGAN				
Organisasi	5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BARITO KUALA				
Unit Organisasi	5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BARITO KUALA				
Program	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
Indikator Hasil	: Persentase SKPD melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang benar Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang tepat waktu				
Kegiatan	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				
Indikator Keluaran	Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun tepat waktu Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun tepat waktu				
Sub Kegiatan	5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.925.000,00	17.929.000,00	4.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	8.480.000,00	5.480.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	38.400.000,00	38.400.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	243.800.000,00	199.916.000,00	-43.884.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	210.186.000,00	210.186.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	81.281.500,00	81.288.500,00	7.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.550.000,00	21.085.000,00	6.535.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	79.500.000,00	123.300.000,00	43.800.000,00	
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	227.300.000,00	227.300.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	178.630.000,00	178.630.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	167.225.500,00	116.883.500,00	-50.342.000,00	
Kegiatan	5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
Indikator Keluaran	Persentase Dokumen penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan Daerah yang disusun sesuai peraturan yang berlaku Persentase Dokumen penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan Daerah yang disusun sesuai peraturan yang berlaku				
Sub Kegiatan	5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				
Indikator Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA TIDAK TERDUGA				
5.3.01	Belanja Tidak Terduga				
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga				
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga				
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-2.000.000.000,00	
Organisasi	5.02.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB. BARITO KUALA				
Unit Organisasi	5.02.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB. BARITO KUALA				
Program	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Indikator Hasil	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan Nilai Evaluasi SAKIP SKPD laporan keuangan sesuai SAP				
Kegiatan	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Indikator Keluaran	Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu Nilai Realisasi Pendapatan Asli Daerah				
Sub Kegiatan	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Indikator Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.01	Belanja Pegawai				
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN				
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	984.003.879,00	984.003.879,00	0,00	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	289.904.000,00	289.904.000,00	0,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN				
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	78.708.851,00	78.708.851,00	0,00	
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	16.146.144,00	16.146.144,00	0,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN				
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	122.430.000,00	122.430.000,00	0,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN				
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	27.440.000,00	27.440.000,00	0,00	

5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN				
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	13.690.000,00	13.690.000,00	0,00	
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	0,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN				
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	47.797.200,00	47.797.200,00	0,00	
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	14.484.000,00	14.484.000,00	0,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN				
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	153.091.496,00	153.091.496,00	0,00	
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.356.495,00	1.356.495,00	0,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN				
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.305,00	15.305,00	0,00	
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.122,00	4.122,00	0,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN				
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	111.097.298,00	111.097.298,00	0,00	
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	26.542.960,00	26.542.960,00	0,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN				
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.361.613,00	2.361.613,00	0,00	
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	695.775,00	695.775,00	0,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN				
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.084.834,00	7.084.834,00	0,00	
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.177.092,00	2.177.092,00	0,00	
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN				
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	5.313.572,00	5.313.572,00	0,00	
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1.530.253,00	1.530.253,00	0,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN				
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	424.292.205,00	0,00	-424.292.205,00	
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	112.491.848,00	0,00	-112.491.848,00	
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN				
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	162.444.563,00	1.370.292.511,00	1.207.847.948,00	
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	0,00	291.074.956,00	291.074.956,00	
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN				
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	0,00	0,00	0,00	
5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	0,00	0,00	0,00	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN				
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	783.555.743,00	0,00	-783.555.743,00	
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	178.583.108,00	0,00	-178.583.108,00	
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				
5.1.01.02.06.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	519.402.366,00	519.402.366,00	0,00	
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	106.250.000,00	106.250.000,00	0,00	
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	

5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
5.1.01.02.06.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	723.626.526,00	723.626.526,00	0,00	
5.1.01.02.06.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	148.750.000,00	148.750.000,00	0,00	
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsepn Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	483.287.473,00	483.287.473,00	0,00	
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	359.550,00	359.550,00	0,00	
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.323.750,00	13.323.750,00	0,00	
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH				
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah				
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	825.000,00	825.000,00	0,00	
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	450.000,00	450.000,00	0,00	
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	127.698.799,00	127.698.799,00	0,00	
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	525.000,00	525.000,00	0,00	
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	450.000,00	450.000,00	0,00	
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
5.1.01.05.10.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsepn Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	65.042.712,00	65.042.712,00	0,00	
5.1.01.05.10.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsepn Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	56.365.124,00	56.365.124,00	0,00	
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH				
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	63.450,00	63.450,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	35.062.500,00	35.062.500,00	0,00	
Bidang Urusan	5.03 KEPEGAWAIAN				
Organisasi	5.03.5.04.0.00.02.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. BARITO KUALA				
Unit Organisasi	5.03.5.04.0.00.02.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. BARITO KUALA				
Program	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
Indikator Hasil	Indek Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian Persentase Aparatur yang Berkualitas				
Kegiatan	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				
Indikator Keluaran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai terhadap formasi pegawai dan persentase informasi kepegawaian Persentase proses pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				
Sub Kegiatan	5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				
Indikator Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	88.320.000,00	88.320.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	815.477.500,00	811.327.500,00	-4.150.000,00	
Bidang Urusan	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. BARITO KUALA				
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. BARITO KUALA				
Program	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
Indikator Hasil	: Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				
Kegiatan	: 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang lulus diklat minimal dengan nilai cukup memuaskan				
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.887.750,00	57.107.750,00	39.220.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.352.500,00	6.352.500,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	800.000,00	1.600.000,00	800.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	121.600.000,00	123.200.000,00	1.600.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	50.800.000,00	50.800.000,00	0,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.498.000.000,00	1.432.000.000,00	-66.000.000,00	
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	585.054.000,00	605.284.000,00	20.230.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	486.989.000,00	491.139.000,00	4.150.000,00	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN				
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Belawang				
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Belawang				
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan				
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Indikator Keluaran	: Persentase Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN				
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.01	Belanja Pegawai				
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN				
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	840.539.639,00	834.539.639,00	-6.000.000,00	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	17.446.500,00	17.446.500,00	0,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN				
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	108.373.670,00	100.583.580,00	-7.790.090,00	
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.442.510,00	2.442.510,00	0,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN				
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	65.240.000,00	65.240.000,00	0,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN				
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN				
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	16.925.000,00	16.925.000,00	0,00	
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN				
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	51.273.360,00	46.273.360,00	-5.000.000,00	
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.607.120,00	2.607.120,00	0,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN				
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	62.878.394,00	62.878.394,00	0,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN				
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.681,00	11.681,00	0,00	
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	590,00	590,00	0,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN				
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	78.207.348,00	78.207.348,00	0,00	
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.539.519,00	1.539.519,00	0,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN				
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.017.300,00	2.017.300,00	0,00	
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	41.874,00	41.874,00	0,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN				
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.051.892,00	6.051.892,00	0,00	
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	125.621,00	125.621,00	0,00	
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN				
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	4.744.573,00	4.744.573,00	0,00	
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	99.448,00	99.448,00	0,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN				
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	278.243.123,00	270.543.123,00	-7.700.000,00	
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	5.832.900,00	5.832.900,00	0,00	
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN				
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	20.369.910,00	48.620.000,00	28.250.090,00	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestas Kerja ASN				
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestas Kerja PNS	502.395.150,00	496.395.150,00	-6.000.000,00	

5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	7.173.900,00	7.173.900,00	0,00	
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	5.610.000,00	9.850.000,00	4.240.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.817.500,00	9.817.500,00	0,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Rantau Badauh				
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Rantau Badauh				
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi SAKIP SKPD				
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Indikator Keluaran	: Persentase Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN di Kecamatan Rantau Badauh				
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.01	Belanja Pegawai				
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN				
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	698.875.040,00	698.875.040,00	0,00	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	68.855.600,00	61.224.332,00	-7.631.268,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN				
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	76.692.705,00	76.692.705,00	0,00	
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.839.320,00	8.839.320,00	0,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN				
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	75.320.000,00	75.320.000,00	0,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN				
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN				
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14.475.000,00	14.475.000,00	0,00	
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.665.000,00	4.900.000,00	3.235.000,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN				
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	45.190.080,00	45.190.080,00	0,00	
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.648.760,00	5.648.760,00	0,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN				
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	71.399.457,00	71.399.457,00	0,00	
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	49.784,00	200.000,00	150.216,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN				
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.587,00	11.587,00	0,00	
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.602,00	1.602,00	0,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN				
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	72.949.246,00	72.949.246,00	0,00	
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.007.219,00	6.007.219,00	0,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN				
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.677.308,00	1.677.308,00	0,00	
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	165.260,00	165.260,00	0,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN				
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.031.905,00	5.031.905,00	0,00	

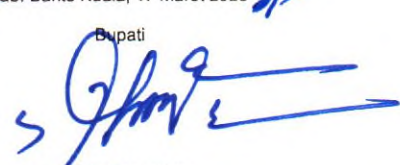
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	495.765,00	495.765,00	0,00	
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN				
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	3.877.843,00	3.877.843,00	0,00	
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	388.480,00	388.480,00	0,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN				
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	276.341.333,00	278.584.068,00	2.242.735,00	
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	22.343.460,00	22.343.460,00	0,00	
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN				
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	55.316.003,00	55.316.003,00	0,00	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN				
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	504.332.003,00	505.650.320,00	1.318.317,00	
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	35.470.013,00	35.470.013,00	0,00	
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.817.500,00	9.817.500,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.415.000,00	9.100.000,00	685.000,00	
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA				
Unit Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA				
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Indikator Hasil	: Persentase realisasi: administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan				
Kegiatan	: 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Indikator Keluaran	: Persentase realisasi: pembayaran jasa penunjang urusan pemerintah daerah				
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	720.000,00	720.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	30.000.000,00	29.000.000,00	-1.000.000,00	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	
Program	: 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
Indikator Hasil	: Persentase kecamatan yang dibina terhadap ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa				
Kegiatan	: 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				

5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.003.000,00	6.764.600,00	-238.400,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.964.175,00	13.861.055,00	5.896.880,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	440.000,00	440.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	170.000,00	170.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	325.000,00	325.000,00	
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.135.405,00	6.149.425,00	14.020,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.770.000,00	91.162.500,00	86.392.500,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	215.415.000,00	116.115.000,00	-99.300.000,00	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	57.750.000,00	54.600.000,00	-3.150.000,00	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	166.450.000,00	139.550.000,00	-26.900.000,00	
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	115.000.000,00	119.500.000,00	4.500.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.150.000,00	16.300.000,00	150.000,00	
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	4.600.000,00	4.200.000,00	-400.000,00	
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	116.050.000,00	128.300.000,00	12.250.000,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.300.000,00	2.800.000,00	500.000,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.900.000,00	6.300.000,00	-600.000,00	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.300.000,00	2.100.000,00	-200.000,00	
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.750.000,00	5.250.000,00	-500.000,00	
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	42.320.000,00	38.640.000,00	-3.680.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	30.500.000,00	30.500.000,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	79.350.000,00	73.350.000,00	-6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	894.000,00	894.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.600.000,00	181.000,00	-6.419.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	140.000,00	140.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	600.000,00	600.000,00	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	30.000,00	30.000,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	100.000,00	100.000,00	

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.800.000,00	13.160.000,00	-20.640.000,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	250.000,00	250.000,00	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	7.900.000,00	7.900.000,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	200.000,00	200.000,00	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	0,00	300.000,00	300.000,00	
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	0,00	925.000,00	925.000,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi				
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	28.800,00	28.800,00	0,00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	36.000,00	36.000,00	0,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	4.980.000,00	4.980.000,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	

Kab. Barito Kuala, 17 Maret 2025

Dupati



H. BAHRUL ILMI

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.800.000,00	13.160.000,00	-20.640.000,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	250.000,00	250.000,00	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	7.900.000,00	7.900.000,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	200.000,00	200.000,00	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	0,00	300.000,00	300.000,00	
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	0,00	925.000,00	925.000,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi				
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	28.800,00	28.800,00	0,00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	36.000,00	36.000,00	0,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	4.980.000,00	4.980.000,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	

Kab. Barito Kuala, 17 Maret 2025

Bupati


H. BAHRUL ILMI